

Prestasi Polri dan Munculnya Kesadaran Masyarakat Akan Bahaya Terorisme

Brigjen. Pol. Dr. Agus Wantoro, M.Si

Judul Penelitian : Penggerebegan Teroris Di Temanggung - Solo; Dampaknya Bagi Polisi Dan Masyarakat.

Peneliti : Brigjen. Pol. Dr. Agus Wantoro, M.Si (Ketua Tim); KBP.(P). Dr. Zakarias Poerba, SH, M.Si; KBP. Drs. Komarul Zaman, SH; Drs. A. Wahyurudhanto, M.Si; Drs. Sutrisno, M.Si; Novi Endah Earlyanti, M.Pd; Lia Sutisna, M.Psi.

A. Latar Belakang

Operasi terpadu penggerebegan teroris di Temanggung oleh Polri dalam hal ini Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri berhasil menghentikan aksi yang dilakukan oleh salah satu pelaku, dengan hasil tewasnya Ibrohim, yang belakangan diketahui sebagai salah orang yang berperan penting dalam peledakan bom di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz Carlton. Operasi terpadu yang memakan waktu sampai 17 jam tersebut, oleh masyarakat diberikan apresiasi namun di sisi lain juga dikritisi sebagai suatu tindakan yang berlebihan dari kepolisian. Aksi Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri dalam menumpas teroris kembali menuai kritik. Ini karena operasi terpadu di Temanggung dan Jatiasih pada 7-8 Agustus lalu ternyata memicu masalah baru, yaitu dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Drama penyergapan sarang teroris, baik di Temanggung maupun di Jatiasih, menyisakan persoalan baru. Tudingan pelanggaran HAM pun diarahkan pada Densus 88 Antiteror. Tudingan ini seolah mengulang kembali perdebatan perihal peran Densus 88 Antiteror Polri dalam melakukan segenap operasi intelijennya. Operasi penumpasan terorisme sejatinya telah diatur melalui UU No 15/2003 tentang Antiterorisme. Dalam operasinya, kepolisian melakukan penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan, harus berdasarkan

hukum acara yang berlaku atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hal ini diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU No 15/2003.

Salah satu kritik oleh masyarakat disampaikan Ketua Presidium Police Watch Neta Ispane. Walau di satu sisi disampaikan apresiasinya bagi kinerja Polri untuk memberantas terorisme di tanah air, namun ia mengungkapkan kekecewaannya pada operasi penggerebekan di Temanggung, sebab berdasarkan hasil evaluasi terlihat tidak bekerjanya intelijen kepolisian, sehingga data yang didistribusikan ke Densus 88 tidak akurat. Akibat ketidakakuratan data intelijen kepolisian tersebut, untuk menangkap satu orang saja perlu 17 jam, ribuan peluru dan ratusan aparat. Dan lebih parahnya yang ditangkap ternyata bukan Nordin M Top, sebagaimana sudah terlanjur dipersepsikan masyarakat. Kritik lain juga disampaikan oleh pembicara Makmur Keliat dan Andi Wijayanto, pada focus group discussion yang diselenggarakan Komnas HAM, pada hari Senen tanggal 31 Agustus 2009, yang menilai bahwa Polisi telah melakukan 'tindakan yang berlebihan'. Realitas yang ditunjuk adalah sama dengan yang diutarakan di atas, terutama pada penggunaan jumlah sumber daya polisi dalam peristiwa yang berujung pada meninggalnya satu orang yang diidentifikasi bernama Ibrohim tersebut.

Sesuai standar operasional polisi, ketika memburu seseorang, maka intelijen kepolisian harus bekerja lebih dulu untuk memberi data yang seharusnya akurat, namun untuk Operasi Temanggung data yang diberikan tidak akurat. Contohnya, pertama disebutkan adanya empat orang di dalam rumah, ternyata satu orang. Hal ini menyebabkan petugas serba salah, sehingga tidak dapat bekerja maksimal dan terjadi Ketidakefisienan. Situasi ini memunculkan kritik agar pihak kepolisian mau membuka diri dan berlapang dada mengakui dan mengevaluasi hasil kerja yang tidak maksimal ini.

Kritik lain datang dari Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Saharuddin Daming. Menurutnya dalam aksi penyergapan yang dilakukan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Kepolisian RI di dua tempat, Bekasi, Jawa Barat, dan Temanggung telah terjadi pelanggaran HAM. Bahkan menurut anggota Komnas HAM ini, aksi penyergapan terutama yang digelar di Temanggung terlalu berlebihan dan lebih mirip eksekusi ketimbang upaya penangkapan untuk menegakkan aturan hukum.

Dalam analisisnya terhadap operasi terpadu di Temanggung

dikhawatirkan malah dapat memicu kemarahan dan aksi balas dendam yang tidak perlu dari para anggota jaringan teroris lainnya. Menurutny dari siaran langsung yang dilakukan oleh stasiun televisi, operasi terpadu tersebut seperti eksekusi mati, karena orang yang diduga tersangka telah diberondong tembakan dan dibom, yang kemudian ternyata buronan tersebut, yang belakangan diketahui bernama Ibrohim tewas di tempat. Tindakan seperti itu melanggar prinsip dan asas praduga tak bersalah dalam penegakan hukum. Berbeda jika hal seperti itu dilakukan oleh militer, yang memang didoktrin untuk menghancurkan dan membunuh musuh.

Dalam pandangannya, penanganan terorisme yang diekspos secara luas di masyarakat melalui tayangan langsung di stasiun televisi, bisa menimbulkan kerawanan baru karena para simpatisannya bisa tergerak untuk melakukan aksi balas dendam yang lebih ekstrim. Dalam keterangannya dengan media, anggota Komnas HAM ini mencurigai ada motif lain sehingga tindakan tersebut dilakukan. Salah satunya adalah motivasi politis dan kekuasaan. Karena itu disarankan pemerintah melakukan evaluasi terkait upaya dan langkah penanganan terorisme selama ini, khususnya yang berpotensi justru memicu aksi balas dendam dan kekerasan lain yang tidak perlu akibat cara-cara penanganan yang salah.

Dengan tertangkap dan tertembaknya Noordin M. Top di Solo, terdapat optimisme baru dalam penanganan terror oleh Polri di Indonesia khususnya di daerah Jawa Tengah. Namun di sisi lain tanggapan dan pandangan masyarakat sekitar lokasi penggrebekan dan penangkapan, senantiasa terdapat pro kontra yang menimbulkan masalah di bidang keamanan. Pandangan ini di dalam realitas mengambil wujud dalam berbagai bentuk, antara lain : Penolakan masyarakat untuk menjadi lokasi penguburan para teroris, sakralisasi lokasi kuburan teroris, friksi antara kelompok masyarakat yang mendukung dan yang menolak, apresiasi terhadap simbolisasi istilah 'jihad' dan simpati terhadap korban yang dicap dengan simbol 'teroris'.

Dari sini saja sudah bisa kita lihat bahwa terorisme memang tidak bisa ditangani dari satu aspek saja melainkan banyak aspek seperti aspek ekonomi, sosial dan budaya sehingga penanganannya juga harus komprehensif. Pengalaman dalam operasi terpadu di Temanggung ternyata memberikan banyak pelajaran. Dari kritik yang datang, menimbulkan pertanyaan apakah operasi terpadu dalam rangka menangkap buronan teroris itu sudah benar,

apakah pemberian hak untuk siaran langsung oleh televisi sudah tepat, dan apakah operasi terpadu yang secara luas disaksikan langsung oleh masyarakat melalui televisi itu memberikan dampak yang positif, baik bagi masyarakat lokal, masyarakat Indonesia secara umum, maupun bagi polisi, baik Polri sebagai institusi maupun para anggota polisi lokal yang saat itu bertugas di lapangan.

Dari dua kegiatan operasi yang dilakukan di Temanggung dan Solo terdapat perbedaan kesan yang bisa ditangkap dari liputan media massa. Masing-masing mempunyai penilaian negatif maupun positif, baik dari masyarakat maupun anggota Polri sendiri. Disamping itu juga muncul penilaian yang berbeda mengenai keberhasilan Polri dalam operasi ini, karena adanya perbedaan cara pandang oleh masyarakat yang terutama dibentuk karena liputan media. Siaran pers resmi oleh pihak Polri tidak bisa secara seragam diekspose media karena adanya *agenda setting* oleh pihak media akibat adanya konflik kepentingan yang berkembang.

Dari pemikiran tersebut maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian yang akan menggali dan menganalisis dampak operasi terpadu dalam penggerebegan teroris di Temanggung dan Solo baik pada masyarakat ataupun polisi. Sehingga diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi acuan bagi institusi Polri maupun para dosen dan mahasiswa di PTIK agar mempunyai tambahan wawasan dalam hal operasi penanganan tindak terorisme.

B. Permasalahan

Permasalahan yang akan diteliti adalah : "Apa dampak pada polisi dan masyarakat setempat atas Operasi Terpadu Penggerebegan Terorisme di Temanggung dan Solo ?"

Untuk mempertajam penelitian ini maka permasalahan tersebut dirinci dalam sub permasalahan berikut:

1. Bagaimana kronologis pelaksanaan Operasi Terpadu penggerebegan teroris di Temanggung ?
2. Bagaimana penanganan Polri dalam Operasi Terpadu penggerebegan teroris di Temanggung ?
3. Bagaimana kronologis pelaksanaan Operasi Terpadu penggerebegan

teroris di Solo ?

4. Bagaimana penanganan Polri dalam Operasi Terpadu penggerebegan teroris di Solo ?
5. Apa dampak Operasi Terpadu penggerebegan teroris di Temanggung pada polisi lokal ?
6. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap Operasi penggerebegan teroris di Temanggung ?
7. Apa dampak Operasi Terpadu penggerebegan teroris di Solo pada polisi lokal ?
8. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap Operasi penggerebegan teroris di Solo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk melihat kronologi pengambilan keputusan organisasi Polri dalam Operasi Terpadu penggerebegan teroris di Temanggung dan Solo ?
2. Untuk melihat penanganan Polri dalam Operasi Terpadu penggerebegan teroris di Temanggung dan Solo ?
3. Untuk mengetahui apa dampak Operasi Terpadu penggerebegan teroris di Temanggung dan Solo pada anggota Polri setempat (Polri dan sekitarnya)?
4. Untuk mengetahui apa dampak (dalam bentuk persepsi) Operasi Terpadu penggerebegan teroris di Temanggung dan Solo bagi masyarakat ?

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini akan diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Diperolehnya informasi akurat mengenai kelebihan dan kelemahan atas Operasi Terpadu tersebut baik dari sisi internal polisi maupun dari persepsi masyarakat.

2. Bagi dosen dan mahasiswa PTIK hasil penelitian ini akan menambah wawasan dalam rangka penyiapan tugasnya setelah lulus dari PTIK terutama jika harus menghadapi tindak pidana terorisme.
3. Bagi lembaga PTIK hasil penelitian ini akan menjadi bahan kajian dosen dan mahasiswa untuk studi lebih lanjut mengenai pola analisa dan penanganan terorisme yang merupakan salah satu ancaman serius dalam rangka keamanan nasional.
4. Bagi organisasi hasil penelitian ini akan menjadi bahan kajian untuk penyempurnaan langkah-langkah strategis dalam Operasi Terpadu khususnya dalam penanganan terorisme.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan pertimbangan keterbatasan waktu penelitian, biaya, serta untuk lebih memfokuskan materi penelitian ini, maka dalam penelitian ini dibatasi dengan ruang lingkup pada tindakan polisi saat Operasi Terpadu penggerebekan teroris di Solo serta bagaimana masyarakat setempat dan media melihat apa yang dilakukan polisi dalam Operasi Terpadu tersebut.

F. Disain Penelitian

- a. Pendekatan : Kualitatif
- b. Metoda : Deskriptis Analitis
- c. Teknik Pengumpulan Data :
 - 1). Penelitian Dokumen (infomasi terbuka dari internal kepolisian, liputan oleh media massa baik cetak maupun elektronik).
 - 2). Wawancara.
- d. Teknik Analisis Data
 - 1). Kompilasi data
 - 2). Verifikasi data
 - 3). Analisis
 - 4). Penarikan kesimpulan

e. Instrumen Pengumpulan Data

- 1). Pedoman Wawancara
- 2). Dokumen Kepolisian
- 3). Kliping media cetak
- 4). Rekaman media elektronik

f. Informan

- 1). Pejabat pada Polda Jateng, Polil Kedu, Polres Temanggung, Polwil Solo, Polresta Solo
- 2). Anggota Densus 88 Antiteror Polri yang bertugas saat Operasi Terpadu
- 3). Anggota Polres Temanggung dan Polresta Solo
- 4). Masyarakat sekitar lokasi dan warga Solo
- 5). Wartawan peliput Operasi Terpadu

g. Waktu Penelitian : 06 Oktober – 11 Oktober 2009.

G. Temuan Penelitian

1. **Kronologis pelaksanaan Operasi Terpadu penggerebegan teroris di Temanggung**
 - a). Kronologi operasi penggerebegan di Temanggung diawali dengan informasi yang diterima oleh Kapolres Temanggung AKBP Ir Muhammad Zari pada hari Jumat tanggal 19 September 2009 sekitar pukul 16.00 bahwa akan ada operasi oleh Densus 88 AT. Untuk itu Kapolres diminta membantu pengamanan lokasi dan logistik bagi anggota Densus 88 AT. Selain itu juga permintaan untuk penyediaan genset serta lampu penerangan dalam rangka operasi tersebut.
 - b). Kapolres segera memerintahkan pada Kapolsek Kedu AKP Setyo untuk mempersiapkan anggota serta segala hal yang diperlukan dalam rangka memberikan dukungan bai operasi tersebut.
 - c). Pada waktu yang hampir bersamaan Kapolsek selain menerima

perintah dari Kapolres juga menerima informasi dari Densus 88 AT.

- d). Segera Kapolsek mengumpulkan anggota xdan melakukan APP. Pembagian tugas pada anggota dilakukan dengan tugas seperti perintah yang diterimanya adalah membendung arus masyarakat agar tidak menuju lokasi penggerebegan, menyiapkan lampu dan senter untuk membantu operasi. Aktivitas Kapolsek dan anggota hanya pada radius diluar 300 meter dari lokasi sasaran. Sementara kegiatan operasi sepenuhnya dilakukan oleh anggota Densus 88 AT. Kapolsek dan jajarannya sama sekali tidak tahu rencana dan langkah-langkah dalam oprerasi tersebut, karena tugasnya hanya mengisolasi sasaran.
- e). Sementara Kapolres memegang komando untuk pengamanan dan hanya “bekerja” pada radius di luar 300 meter. Untuk pelaksanaan operasi sepenuhnya dilakukan oleh anggota Densus 88 AT.

2. Penanganan Polri dalam Operasi Terpadu penggerebegan teroris di Temanggung

- a). Pelaksanaan operasi sesuai dengan SOP yang berlaku, sehingga operasional sepenuhnya dilakukan oleh anggota Densus 88 AT.
- b). Kapolres beserta jajarannya sesuai perintah mengamankan lokasi, dengan melakukan pemblokiran massa agar tidak mendekat ke lokasi. Termasuk yang dilakukan oleh Kapolres adalah melarang pejabat lain untuk masuk ke lokais sasaran. Sehingga Bupati Temanggung bersama Danrem dan Dandim berada di lokasi di luar 300 meter, yaitu di SDN Beji, Kedu.
- c). Pada hari Sabtu tanggal 20 September SDN Beji, Kedu yang jaraknya hanya sekitar 400 meter dari lokasi meliburkan muridnya.
- d). Operasi ini berlangsung sampai hampir 18 jam karena adanya berbagai pertimbangan akibat tidak diketahui secara pasti ada berapa orang yang berada dalam rumah tersebut. Upaya untuk mendeteksi dengan menggunakan robot gagal, karena satu

atas permintaan Kapoltabes untuk membantu pemadaman api dibawah perlindungan tim Densus. Pada saat yang bersamaan pula salah seorang tim Densus terkena tembakan pada bagian antara jari tengah dan jari manis tangan sebelah kiri, yang segera dievakuasi untuk mendapat pertolongan. Menjelang makan sahur (sekitar pk. 03.00 wib) tim Densus melemparkan bom pertama ke arah rumah tersangka, meminta tersangka untuk menyerah, tetapi tidak ada jawaban dan baku tembak berhenti untuk sementara waktu. Kemudian selepas pk.03.00 wib dari pihak Densus memberikan peringatan kembali untuk menyerah tetapi tidak diindahkan juga dan disambut lagi dengan tembakan dari dalam rumah. Peringatan dari Densus 88 sudah dilakukan sebanyak tiga kali kepada tersangka di dalam rumah mulai peringatan pertama sekitar pk. 22.00, peringangan ke dua sekitar pk. 03.00 wib dan peringatan terakhir pada pk. 05.00 wib. Tetapi ketiga peringatan ini tidak diindahkan oleh para tersangka, melainkan membalasnya dengan memberikan rentetan tembakan terhadap tim Densus.

- e). Sekitar pk. 06.00 wib baku tembak berhenti dan dari tim Densus melemparkan bom ke dua kearah rumah tersangka untuk memastikan tidak ada perlawanan lagi. Kemudian dilakukan evakuasi korban, yang diduga sudah meninggal dipimpin langsung oleh KBP Petrus Golose yang bertindak sebagai Koordinator Pengendali Lapangan Tim Densus 88. Pada saat proses evakuasi, KBP Golose melihat pada tumpukan mayat yang ditemui di bagian belakang rumah tepatnya di kamar mandi masih bergerak. Kemudian memerintah untuk memanggil tim medis karena masih ada korban yang masih hidup. Tim medis lokal ditangani oleh AKP dr. Nariyana langsung membawa korban yang ternyata Putri Munawaroh (istri Susilo) ke RS. OEN, (rumah sakit yang jaraknya paling dekat dengan lokasi kejadian) untuk mendapat pertolongan dengan menggunakan ambulans yang sudah disiapkan.
- f). Ambulan yang sudah disiapkan sebanyak 5 (lima) buah. Pada saat penanganan korban di RS. OEN, sangat dirahasiakan dan

pihak rumah sakit sangat kooperatif. Ini terbukti sekitar pk. 06.00 wib, menurut dr. Nariyana ada sekitar 4 orang yang berpenampilan dengan jangut dan celana model cingkrang mendatangi bagian informasi RS. OEN, saat itu diduga kelompok orang yang sedang mencari informasi mengenai keberadaan Putri Munawaroh. Penanganan segera dilakukan terhadap Putri Munawaroh yang dinyatakan sedang hamil dan anggota tim Densus yang mengalami cedera akibat tembakan. Evakuasi Putri Munawaroh dilakukan pada pk. 11.00 wib ke Jakarta (setelah dokter menyatakan kondisinya bisa diberangkatkan ke Jakarta) bersamaan seluruh tim densus, perlengkapan dan barang bukti yang diperoleh.

g). Proses evakuasi tersangka dari dalam rumah dilakukan dengan cara mengerek keluar, hal ini dikarenakan takut bila ada bom yang mungkin masih meledak yang terselubung di tubuh tersangka. Evakuasi korban berlangsung hingga pk. 06.00 yang disaksikan oleh ketua RT, Lurah (A. Sri Wahyono), Babinkamtibmas Jebres (Briptu Temu). Mulai dari pengerekan jenazah, melihat kondisi jenazah, memasukan ke kantong mayat sampai memasukan ke mobil ambulans. Sebelum mendatangkan saksi terlebih dahulu dilakukan sterilisasi rumah tersangka, mulai dari dinding, lantai rumah dan tempat-tempat yang mencurigakan. Proses strerilisasi ini ditemukan pula barang bukti berupa Potasium sebanyak 8 karung @ 25 kg, senjata jenis SMR, AKA/47, senjata Baretta, peluru. Kemudian dilakukan pengumpulan proyektil yang berada di dalam rumah dan di luar rumah disimpan secara terpisah.

h). Setelah rumah dinyatakan steril, AKBP Wahyu Diningrat meminta Kapolsek Jebres (AKP Dwi Retnowati, SH, MH) untuk memageri TKP dengan seng dan memasang police line, kegiatan ini berlangsung mulai pukul 11.00 s.d 14.00 wib, setelah itu TKP dijaga secara bergilir oleh personil Brimob Powil surakarta, anggota Dalmas Poltabes Surakarta, dan anggota Polsekta Jebres sejumlah 30 orang (satu pleton) setiap harinya hingga hari ini (Kamis, 08 Oktober 2009).

4. Penanganan Polri dalam Operasi Terpadu penggerebegan teroris di Solo

- a). Penanganan Polisi kewilayahan dalam mendukung operasi terpadu dilakukan berdasarkan instruksil Kapolwil dan Kapoltabes Surakarta yang dibantu oleh Tim kesehatan, Pemadam Kebakaran, Ambulan dari Dinas Kesehatan, Polsekta Jebres. Instruksi ini dilakukan secara mendadak dan rahasia guna membantu keberhasilan kerja tim Densus 88 dalam operasi penggrebegan.
- b). Tugas utama Polisi kewilayahan berada pada ring 2 dan ring 3, sedangkan ring 1 khusus tim densus 88. Pada ring 2, Polisi membantu densus dalam mengevakuasi warga disekitar TKP dan mendukung apabila tim Densus membutuhkan bantuan (contoh: pada saat kekurangan peluru, sokley, pemadam kebakaran, ambulan). Pada ring 3, Polisi bertugas untuk menyekat dan menghalau masa dan wartawan agar tidak mendekat ke TKP dengan alasan keamanan. Serta mengatur arus lalu lintas pada saat kejadian dan proses evakuasi korban, jenazah dan barang bukti. Mulai dari TKP, RS. Dr. OEN, sampai bandara Adi Sumarmo untuk diberangkatkan ke Jakarta. Kegiatan polisi wilayah setelah tim Densus kembali ke Jakarta adalah penanganan TKP sampai dengan rumah yang rusak tersebut selesai diperbaiki (kerusakan rumah diganti sebesar 47jt dilaksanakan dengan tender oleh Densus 88).
- c). Personil identifikasi Sat Reskrim Poltabes Solo diminta untuk melakukan olah TKP oleh ketua tim Densus 88 setelah semua korban, jenazah dan barang bukti dievakuasi dan TKP dinyatakan steril. Dari satuan Intelijen kewilayahan pada saat terjadi penggrebegan maupun pasca penggrebegan tetap melakukan penyelidikan guna mencari informasi yang berkaitan dengan kasus terorisme yang terjadi guna mendukung kegiatan tim Densus 88.

5. Dampak Operasi Terpadu penggerebegan teroris di Temanggung pada polisi lokal

- a). Walau ada rasa puas bagi polisi lokal – dalam hal ini anggota Polsek Kedu – namun mereka merasa kelelahan, karena tugas mendadak. Perintah baru diterima oleh Kapolsek pada Hari Jumat 19 September 2009 sekitar pukul 16.00, namun dalam hitungan menit harus segera dilakukan dukungan bagi aktivitas operasi Densus 88 AT. Operasi yang berlangsung sampai 18 jam menjadikan tingkat kelelahan yang tinggi, karena seluruh kekuatan dikerahkan dan tidak ada kesempatan untuk beristirahat.
- b). Bagi Kapolsek informasi yang mendadak dipahami sebagai SOP yang harus dilakukan. Namun dengan waktu operasi yang sangat lama, sementara keterlibatan Kapolsek dan anggotanya yang walau hanya menjaga pada radius di luar 300 meter, menjadikannya anggota tersita energinya. Sehingga terkesan menjadi tidak efektif.
- c). Untuk pengalaman di masa mendatang, menurut pandangan Kapolsek perlu ada penyempurnaan dalam standar operasi, agar efisiensi dan efektifitas bisa berjalan dengan memadai.
- d). Dari sisi penghargaan secara sosial, hasil yang dicapai dinilai positif oleh warga masyarakat. Dengan keberhasilan ini maka ada apresiasi yang diberikan masyarakat pada polisi.
- e). Namun di sisi lain ada juga penilaian bahwa kinerja polisi ini terlalu “over”, karena memakan waktu yang lama dengan kekuatan yang dinilai berlebihan. Sampai ada komentar dari Danrem, karena operasi harus ketat dengan SOP maka operasi tersebut memerlukan waktu sampai 18 jam dengan hasil satu orang saja. Jika militer yang bekerja, cukup 5 menit dengan menggunakan tank, karena toh sasarannya juga akhirnya tewas.

6. Persepsi masyarakat terhadap Operasi penggerebegan teroris di Temanggung

- a). Penduduk sekitar tidak mengetahui keberadaan seorang teroris yang ternyata adalah tetangga mereka, selama ini penduduk sekitar memiliki kebiasaan dalam keterbukaan mereka menerima tamu atau anggota penduduk baru yang baru memasuki daerah dusun pedesaan. Hal ini dianggap mereka sebagai suatu karakter umum dusun sekitar, serta masyarakat sekitar daerah penggerebegan tidak mengetahui rencana para anggota densus dalam upaya membekukan dan pengepungan terhadap sang teroris.
- b). Menurut kepala dusun setempat, penduduk sekitar yang tinggal berdekatan dengan rumah yang ditempati Ibrohim justru dalam situasi yang terbilang kondusif atau lebih tenang di bandingkan dengan pemberitaan di media elektronik yang menggambarkan situasi sekitar cukup mencekam. Penduduk sekitar yang tinggal berdekatan dengan rumah yang dihuni teroris tidak terlalu mengalami kekhawatiran yang hebat karena mereka merasa aman telah dilindungi oleh para anggota Densus 88 Anti Teror saat dilakukannya penyisiran daerah sekitar rumah pada sore hari menjelang penggerebegan.
- c). Pasca insiden penggerebegan, penduduk dusun sekitar cukup antusias dalam memberikan penghargaan dan apresiasi terhadap kinerja densus 88 yang berhasil dalam mengungkap teroris walau tidak sesuai dengan nama teroris yang selama ini menjadi incaran utama Polri. Hal ini sudah dianggap puas oleh penduduk sekitar karena dianggap setidaknya orang yang juga dianggap berbahaya tersebut tidak sempat merugikan atau membahayakan penduduk sekitarnya.
- d). Hampir seluruh guru tidak merasakan kekhawatiran yang luar biasa karena keberadaan teroris yang sangat dekat dengan lingkungan sekolah. Salah satu analisa yang dapat terlihat adalah informasi yang disampaikan kapolsek saat peristiwa sebelum terjadinya penggerebegan pada hari yang sama. Instruksi yang

disampaikan sangatlah sederhana dengan meminta para murid untuk melakukan aktivitas belajar di sekolah dengan belajar secara mandiri di rumah masing-masing. Instruksi ini tidak seyogyanya dianggap sebagai ketakutan, walau sedikit yang menganggap heran atas instruksi tersebut.

e). Terdapat satu orang guru, yaitu ibu Rohkimiyah, seorang guru agama yang sangat khawatir pasca pemberitaan dan sempat mendengar beberapa letusan karena domisili tempat tinggal subyek lebih dekat dengan rumah yang dihuni Ibrohim dibandingkan dengan rumah tinggal guru-guru yang lain. Hingga saat ini subyek merasa enggan untuk melihat dan memasuki area rumah yang sempat dihuni oleh teroris. Subyek cenderung menjadi mengasosiasikan rumah tersebut dengan pengeboman yang akan terjadi di daerah dusun.

f). Sebagian besar murid-murid tidak teralu merasakan dampak ketakutan ataupun kekhawatiran yang sangat besar saat insiden penggerebegan terjadi. Hanya beberapa murid perempuan yang tinggal berdekatan dengan lokasi penggerebegan merasakan sedikit kekhawatiran. Kekhawatiran ini tidak teralu dianggap sebagai sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap guncangan psikologis murid-murid perempuan dan sudah kembali pulih.

g). Pihak sekolah dan penduduk dusun diperbantukan oleh sebuah LSM dalam hal ini adalah pihak dari WCC (*Woman and Children Crisis*) membantu pihak sekolah beserta dengan murid-murid pasca insiden penggerebegan melalui penanganan psikologis walau tidak ditemui sejumlah murid yang mengalami gangguan psikologis berat.

h). Informasi dari wartawan, sebelum insiden penggerebegan, para wartawan di Temanggung sudah mengetahui informasi mengenai keberadaan teroris dari wartawan di Jakarta. Beberapa wartawan langsung menuju Temanggung yang diketahuinya sebagai posisi sang teroris, dan beberapa wartawan setempat di Temanggung yang sudah dihubungi oleh wartawan dari Jakarta

untuk meliput penggerebegan yang akan dilakukan Densus 88 Anti Teror.

- i). Pada saat terjadinya insiden, menurut wartawan tidak sedemikian dahsyat seperti pemberitaan dan siaran dari media eletronik yang memunculkan lokasi penggerebegan, justru situasi yang dirasakan cukup tenang. Para wartawan media cetak menilai terjadi dramatisasi yang berlebihan, sehingga terkesan selama 18 jam suasananya mencekam. Padahal pengambilan gambar dilakukan oleh stasiun televisi dari jarak sekitar 500 meter. Sehingga sangat sulit bagi wartawan televisi merasakan situasi emosional yang sebenarnya, walau pengambilan gambar bisa dilakukan dengan melakukan zoom.
- j). Analisa para wartawan menduga bahwa pelaku teror yang berada di rumah tersebut bukanlah Noordin M.Top yang selama ini menjadi buron utama polri. Hal ini atas dasar asumsi bahwa rumah tersebut juga pernah dilakukan penggerebegan sebelumnya dan situasi daerah sekitar cukup ramai. Asumsi pemikiran para wartawan bahwa seorang teroris akan lebih memilih tempat tinggal dengan situasi yang lebih sepi dibandingkan dengan dusun di Temanggung.
- k). Pendapat wartawan terhadap kinerja Densus 88 Anti Teror selama insiden kejadian dianggap kurang efektif dan terlalu banyak menghabiskan waktu. Wartawan berasumsi jika waktu terundur lama maka konsentrasi massa akan semakin banyak dan reaksi yang dilakukan perlu ditindak secara langsung dan cepat terselesaikan. Wartawan memiliki pandangan tersendiri terhadap kinerja Polri dalam menangani kasus terorisme di Indonesia, dengan alasan kurang efektif dalam penanganan teroris di Indonesia, serta hukuman yang di terapkan masih terbilang ringan karena dianggap membahayakan banyak orang.
- l). Pemberitaan yang berlebihan ini juga membuat risau beberapa pondok pesantren yang santrinya selalu berpenampilan ala orang Timur Tengah. Menurut mereka, karena pemberitaan di

media juga mengangkat nara sumber dadakan, diantara mereka ada yang membenarkan "aksi heroik" para teroris. Selain itu ada yang berpendapat bahwa orang yang berpenampilan mengikuti sunnah sebagai orang yang sekomplotan dengan para teroris tersebut. Akibatnya bagi sebagian orang yang bercelana di ta smata kaki, dengan cambang yang lebar dan istrinya mengenakan cadar merasa risau karena akibat pemberitaan yang menurut mereka dilebih-lebihkan menjadikan dirinya diawasi secara terus menerus.

7. Dampak Operasi Terpadu penggerebegan teroris di Solo pada polisi lokal

- a). Peran Polisi di Wilayah (Polwil, Poltabes, dan Polsek Jebres) dalam operasi terpadu bersifat mendukung anggota inti penggerebegan di Ring 1 yang sepenuhnya dalam kendali Densus 88 Anti Teror. Jadi, dalam posisi ini polisi wilayah berada pada Ring 2 dan Ring 3. Fungsi paling mendasar pada Ring ini adalah mem-blokir TKP pada jarak aman masyarakat, diantaranya wartawan. Posisi ini (sterilisasi wartawan) menjadi penting dari konteks pasca operasi. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga dari kasus penggerebegan di Temanggung, wartawan memasuki jarak dekat, selain ada resiko peluru nyasar, pada pasca aksi akan mengundang spekulasi pemberitaan; spekulasi analisa.
- b). Strategi kontinjensi yang diterapkan kepolisian wilayah dalam mendukung pengerebegan yang dilakukan Densus 88 Anti Teror adalah strategi paling realistis diterapkan. Instruksi Kapoltabes untuk segera meluncur ke TKP dengan bertugas menurut peran masing-masing fungsi, adalah instruksi yang "longgar"-- tidak detail. Pilihan strategi ini menjadi pelajaran bagi kepolisian wilayah untuk selalu siap; siaga dalam pegertian luas disiplin dan bertanggungjawab. Signifikansi pentingnya kedisiplinan dan kesigapan adalah pelajaran berharga bagi kepolisian kewilayahan Surakarta yang diperoleh dari pengalaman penggerebegan teroris pada 16 September 2009.

c). Penggerebegan yang terkesan sangat mendadak dan tiba-tiba ini juga memberikan 'energi' kesadaran di kalangan kepolisian dalam kaitannya dengan potensi (asal-usul) terorisme. Data responden poin ini diperoleh dari kalangan intelejen. Kemungkinan tumbuh suburnya potensi rawan ancaman keamanan yang tertanam pada struktur – kultur masyarakat, utamanya kekerasan berbasis agama. Ditengarai Kyai Abubakar Ba'asyir dengan Pesantren Ngruki-nya masih dipandang potensial dalam memberikan kontribusi terhadap kekerasan berbasis agama. Poin ini merangsang polisi bekerja sama dengan instansi terkait. Misalnya dengan Depag (Deperteman Agama), Depertemen Pendidikan, dan institusi non pemerintah dalam hal ini adalah sejumlah pesantren (yang ditengarai memberi kontribusi terhadap terorisme). Bukan sekedar pentingnya meningkatkan kinerja intelejen, namun lebih jauh adalah kerjasama antar instansi.

d). Dampak dari operasi terpadu ini sangat dirasakan oleh Polisi kewilayahan yang ditanggapi sangat positif. Diantaranya adalah suatu penilaian dimana mereka tidak merasa dilangkahi oleh pihak Mabes Polri yang telah melakukan tindakan kepolisian di wilayah hukum Surakarta, dengan alasan itu dianggap sebagai SOP (standar Operating Prosedur) dari Densus 88. Mereka mendapat pengalaman dan pemahaman yang baru mengenai tindakan lapangan yang harus dilakukan Densus 88 dalam melakukan tindakan kepolisian (penggerebegan disatuan kewilayahan). Dan Polisi kesatuan kewilayahan merasa sangat bangga karena dapat membantu dan mendukung Densus 88 mabes Polri dalam menumpas teroris, terlebih ketika diketahui bahwa yang tertembak adalah gembong teroris yang sudah 9 tahun menjadi DPO (daftar Pencarian Orang).

e). Keberhasilan Densus 88 dalam melakukan operasi, menjadi motivasi Polisi kewilayahan dalam mencari informasi terhadap jaringan teroris yang tersisa, dan lebih meningkatkan kewaspadaan wilayah terhadap orang asing yang datang.

8. Persepsi masyarakat terhadap Operasi penggerebegan teroris di Solo

- a). Persepsi masyarakat pada lokasi terdekat dengan TKP terhadap proses penggerebegan yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror relatif homogen. Utamanya, pandangannya mengenai upaya/cara perlindungan Densus 88 Anti Teror pada masyarakat terdekat dengan TKP. Menurut penuturan Ibu Widodo (55 tahun), penghuni rumah tepat disamping kiri rumah TKP, Beberapa detik setelah tembakan pertama yang dilontarkan dari dalam rumah TKP, setiap anggota keluarga dipapah oleh satu anggota Densus menjauh dari lokasi, dengan cara seakan-akan melindungi dengan badannya. Seorang anggota Densus 88 menggendong suaminya yang lumpuh; anggota lain 'membopong' anak-anak kecil usia 3 – 4 tahun. Proses ini oleh warga dilihat sebagai cara yang simpatik.
- b). Perasaan simpatik ini dirasakan setelah mereka yakin betul bahwa tetangganya yang digerrebeg Densus 88 pada malam pukul 23.00 adalah betul seorang teroris. Selang satu hari penggerebegan mereka yakin bahwa Susilo adalah teroris, komentar Ibu Widodo, "Karena namanya (Susilo) ada dalam leptopnya Noordin M. Top". Semakin lengkap perasaan simpatik mereka terhadap Densus 88 setelah mengetahui secara jelas, meskipun hanya lewat televisi, bahwa didalam rumah yang dikontrak Susilo dan Istrinya ternyata ada teroris yang lain; Urwah, Aryo Sudarsono, dan teroris kelas kakap Noordin M. Top.
- c). Dalam proses evakuasi ini seorang anggota Densus 88 sambil mengatakan "di samping rumah ibu ada teroris!". Terhadap sejumlah warga agaknya sulit mempercayai, anggota Densus ini menimpali,"Lihat sajalah nanti setelah ini!". Saling tembak antara penghuni rumah Putri (sebutan untuk istri Susilo) dengan Densus 88 Anti Teror, bagi Ibu Widodo sulit diterima sebagai kenyataan. Karena, rasanya dirinya cukup akrab dan mengetahui betul siapa Putri. Putri dikenalnya sebagai pemberi les privat-gratis membaca Al Qur'an dan ketrampilan cucunya.

Begitu pula suami Putri, Susilo, adalah anak muda pengantin baru yang ramah.

- d). Lurah Mojosongo A. Sri Wahyono, memandang dua hal terhadap penggerebegan rumah teroris. *Pertama*, bangga, karena proses pengerebegan ini pada dasarnya bersifat "tertutup", dirinya sebagai Lurah tak diberikan informasi akan ada tindakan penggerebegan; tetapi relatif sukses dan tanggap. Justru setelah ada saling tembak, Lurah dikontak oleh anggota Polmas, Temu. Dalam proses itu Sri Wahyono bersama Camat Jebres berada di Ring 3, sebetulnya tak ada yang serius ia lakukan selama itu, hanya menghimbau masyarakat agar mengikuti instruksi anggota polisi. *Kedua*, ada perasaan kecewa terhadap sistem kelembagaan masyarakat yang nyaris tak berfungsi. Ia berpendapat mustinya terorisme jika ada di wilayahnya segera dapat diketahui kalau sistem kelembagaan sejak dari RT / RW berjalan dengan baik, apa lagi jika masyarakat mau tanggap terhadap gelagat aneh di wilayahnya.

H. Pembahasan

1. Analisis Penanganan Polri dalam Operasi Terpadu Penggerebegan Teroris

- a). Jika dibandingkan dengan operasi penggerebegan di Temanggung dan di Solo terdapat kesan yang sangat mencolok, terutama dari persepsi yang dilakukan oleh media maupun masyarakat. Operasi di Temanggung dinilai sangat tidak efisien dan tidak efektif, sementara operasi di Solo dinilai sesuai dengan sasaran.
- b). Dari data yang diperoleh, operasi di Solo lebih matang karena data awal diolah dengan lebih matang dengan informasi yang akurat, sehingga langkah-langkah yang dilakukan bisa terasa lebih sistematis.
- c). Operasi di Temanggung memberikan banyak pelajaran mengenai perlunya informasi yang akurat agar dalam pengambilan keputusan juga akan lebih baik.

d). Pelibatan media yang tidak intensif seperti di Solo juga memberikan dampak yang lebih baik bagi pencitraan kinerja Polri.

2. Analisis Dampak Operasi Terpadu Penggerebegan Teroris pada Anggota Polri Setempat

a). Secara umum, baik di Solo maupun di Temanggung kinerja polisi memperoleh apresiasi dari banyak pihak.

b). Bagi polisi lokal tugas mengamankan lokasi merupakan pekerjaan berat karena tidak pernah dilakukan latihan-latihan serta persiapan jika harus memberikan dukungan operasi bagi Densus 88 AT. Kasus di Temanggung dimana petugas harus siap selama 18 jam sangat menyita energi.

c). Pada masa mendatang perlu ada perbaikan, terutama dalam pelibatan polisi lokal, sehingga selalu dalam kesiapan yang memadai.

3. Analisis Persepsi Masyarakat atas Operasi Terpadu Penggerebegan Teroris

a). Bagi masyarakat yang berdomisili dekat dengan lokasi operasi memang ada traumatis atas kejadian tersebut. Namun pada masyarakat yang tinggal jauh ternyata traumatis tersebut seperti tidak dirasakan.

b). Pemberitaan media yang sangat berlebihan, terutama dramatisasi yang berlebihan pada media elektronik menimbulkan kesan mencekam. Ternyata pada kenyataannya di lapangan tidak "seseram" pemberitaan. Persepsi seolah polisi "sadis" lebih terbentuk karena peran media.

c). Disamping itu komentar para analisis yang selalu dengan kaca mata masing-masing, kadang justru merugikan karena bisa menimbulkan persepsi yang keliru oleh masyarakat.

d). Kinerja polisi yang terencana dengan baik seperti dilakukan di Solo mampu menghapus sorotan kelemahan ketika melakukan operasi di Temanggung. Sehingga pola yang lebih rapi di

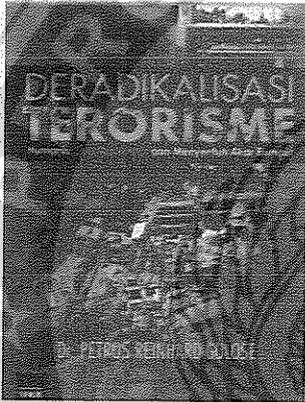
Solo perlu dijadikan acuan untuk operasi selanjutnya dengan berbagai penyempurnaan.

I. Rekomendasi

- a). Guna keberhasilan dan kelancaran Operasi Terpadu, perlu disusun/disempurnakan SOP pelibatan/perbantuan satuan kewilayahan pada Densus 88 / AT Mabes Polri. Hal ini dikarenakan peran satuan kewilayahan selain memberikan dukungan pengamanan juga dukungan logistik.
- b). Selaras dengan meningkatkan ancaman terorisme dan semakin banyaknya potensi penyebaran paham terorisme, diperlukan kesiapan bagi satuan kewilayahan melalui penyelenggaraan latihan dan simulasi penanganan terorisme secara terpadu.
- c). Peristiwa tertangkapnya teroris di Temanggung telah menyadarkan masyarakat akan bahaya terorisme yang dapat juga terjadi di daerah lain. Selama ini tindakan terorisme dinilai sebagai salah satu wujud dari aksi jihad, namun sesungguhnya terorisme merupakan salah satu ideologi yang dikembangkan oleh para teroris. Untuk memelihara dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya terorisme, diperlukan upaya Polri untuk melibatkan tokoh agama (pimpinan Pondok Pesantren, Kyai, Ustadz, tokoh agama lain) dan tokoh masyarakat agar selalu mewaspadaikan potensi terorisme.
- d). Operasi Terpadu Penggerebegan Teroris di Solo dinilai masyarakat sebagai salah satu model operasi yang efektif. Hal ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan operasi ke depan, serta dapat dijadikan sebagai bahan untuk menyusun model pelatihan penanganan terorisme dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat setempat dan hak asasi manusia.
- e). Kontroversi pemberitaan terhadap penggerebegan terorisme secara vulgar telah menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi Polri, untuk itu diperlukan standar prosedur peliputan media dalam operasi-operasi kepolisian yang mempunyai sensitifitas tinggi dengan tetap memperhatikan kepentingan penyidikan.

DEREDIKALISASI TERORISME :

Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumpuk



Sebuah karya dari Dr. Petrus Reinhard Golose, Doktor lulusan Universitas Indonesia yang berpangkat Komisariss Besar Polisi dan pernah terjun langsung di dalam kancah peperangan dengan terorisme baru-baru ini diterbitkan oleh YPKIK (Yayasan Pengembangan Kajian ilmu Kepolisian). Buku yang menceritakan pengalaman penulis dalam proses pemberantasan terorisme melalui reedukasi dalam rangka proses deredikalisasi. Buku ini menarik, karena baru-baru ini kita disuguhkan oleh berita yang menyenangkan seluruh anak bangsa, yaitu prestasi Polri dengan keberhasilan melumpuhkan Noordin M.Top di Solo. Namun perilaku terorisme dan radikal tentunya tidak dapat dalam sekejap diberantas.

Buku ini menceritakan anatomi berbagai organisasi terorisme di seluruh dunia, peristiwa-peristiwa terorisme di berbagai belahan dunia, organisasi Al-Qaeda dan jaringannya di Indonesia serta dunia. Bagaimana perang melawan terorisme menjadi bagian dari perang global yang saling berkaitan tidak hanya di negara maju, namun juga di di negara berkembang. Strategic planning dan action di berbagai belahan dunia untuk memerangi terorisme juga disuguhkan dalam buku ini. Bagaimana jaringan organisasi terorisme ini dapat berkembang begitu cepat dan menanamkan benih-benih radikalisme di Indonesia.

Bagaimana pula peran Polri, Lembaga Pemasarakatan dalam hal proses deredikalisasi juga turut disuguhkan dengan manis, karena menyangkut

berbagai aspek dari proses kognitif dan afektif manusia pada umumnya dan manusia Indonesia pada khususnya menyangkut karakter manusia Indonesia yang humanis dan *soul approach* juga sebagai strategi jangka panjang dalam rangka proses meredam doktrinisasi radikalisme juga dijelaskan secara sistematis dan bertahap.

Tiga kunci terpenting dalam program deredikalisasi terorisme adalah *humanis, soul approach* (pendekatan kejiwaan) dan menyentuh akar rumput. Humanis berarti upaya pemberantasan terorisme haruslah sesuai dengan upaya penegakan Hak Azasi Manusia, selain itu pemberantasan terorisme harus mampu menciptakan kesejahteraan, kesetaraan, serta keadilan bagi seluruh masyarakat, termasuk bagi para tersangka maupun terpidana terorisme. *Soul approach* artinya, pemberantasan terorisme dilakukan melalui suatu komunikasi yang baik dan mendidik antara aparat penegak hukum dengan para tersangka maupun terpidana terorisme., bukanlah cara-cara kekerasan dan intimidasi. Menyentuh akar rumput, program ini tidak hanya ditujukan kepada para tersangka maupun terpidana terorisme, akan tetapi program ini juga diarahkan kepada simpatisan dan anggota masyarakat yang telah terekspos paham-paham radikal, serta menanamkan multikulturalisme kepada masyarakat luas.

Buku setebal 129 halaman ini berupaya membuka wawasan, bahwa untuk memberantas terorisme diperlukan penanganan interdisipliner. Dari *best practices* yang diterapkan di Arab Saudi, Yaman, Mesir, dan Singapura, kita dapat meramu program-program deredikalisasi yang khas di Indonesia: *humanis, soul approach* dan *menyentuh akar rumput*. Buku ini patut dibaca oleh Kriminolog, Akademisi dan Praktisi (Polisi, Jaksa, Hakim dan Petugas LP) yang berkaitan secara langsung dalam menangani permasalahan tersangka dan terpidana terorisme saat ini. (Juliarnan Pasaribu)

